

**PERANAN DPRD DALAM MEWUJUDKAN TATA  
PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KABUPATEN  
ACEH TENGGARA**

**TESIS**



**Oleh :**

**HENDRA FADHLI  
NPM. 051801018**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2007**

# **PERANAN DPRD DALAM MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KABUPATEN ACEH TENGGARA**

## **TESIS**

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik (MAP)  
Pada Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area



Oleh :

**HENDRA FADHLI**

**NPM. 051801018**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2007**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul : PERANAN DPRD DALAM MEWUJUDKAN TATA  
PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KABUPATEN ACEH  
TENGARA**

**N a m a : HENDRA FADHLI**

**N I M : 051801018**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Drs. Heri Kusmanto, MA**

**Drs. Tony P. Situmorang, MA**

**Ketua Program Studi  
Magister Administrasi Publik**

**Direktur**

**Drs. Kariono, MA**

**Drs. Heri Kusmanto, MA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala hidayah dan karunia-Nya yang selalu menyertai penulis dari awal penulis menuntut ilmu pada Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP) Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area sampai dengan selesainya penulisan tesis yang berjudul "Peranan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik di Kabupaten Aceh Tenggara". Selanjutnya Selawat dan Salam tidak lupa penulis sampaikan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA, selaku Direktur PPs Universitas Medan Area dan sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini kepada penulis selama penulis belajar di PPs Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
2. Bapak Drs. Tony P. Situmorang, MA, selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak Drs. Kariono, MA, selaku Ketua Program Studi PPs Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama penulis belajar di PPs Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.

4. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
5. Bapak Bupati Kabupaten Aceh Tenggara, atas izin belajar dan bantuan yang diberikan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar PPs Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala dukungan dan bantuan yang diberikan.

Terima kasih dan salam kasihku untuk kedua orangtuaku dan keluargaku, yang tidak pernah putus memberikan semangat, berkorban waktu, tenaga serta materi yang tak terhingga dan mengalirkan do'a demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Semoga amal sholeh mereka semua mendapat taufik dan rahmat Allah Subhanahu Wata'ala, Amin Ya Rabbal Alamin.

Medan, Juni 2007  
Penulis,

**HENDRA FADHLI**

## DAFTAR ISI

Halaman

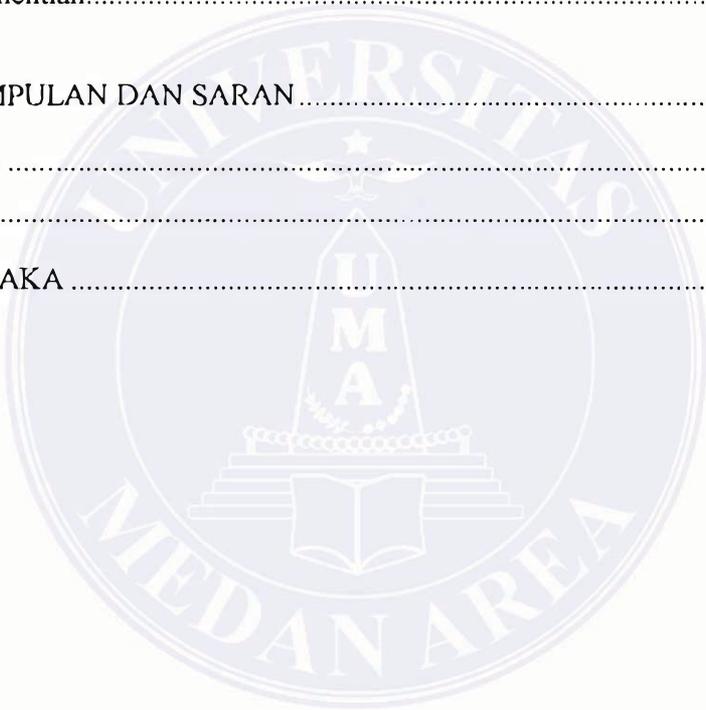
HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
INTISARI .....	x
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
1.5. Hipotesis Penelitian .....	9
1.6. Sistematika Penelitian .....	10
BAB II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN .....	11
2.1. Pengertian Good Governance.....	11
2.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Good Governance.....	19
2.2.1. Pengalaman Indonesia .....	19
2.2.2. Pengertian Demokratisasi Menuju Good Governance.....	21
2.2.3. Strategi Pelaksanaan Otonomi Daerah.....	24
2.3. Optimalisasi Peran DPRD.....	26

2.4. Alat Kelengkapan DPRD .....	35
2.5. Larangan dan Pemberhentian Anggota DPRD .....	37
2.6. Konsep Kinerja .....	39
2.6.1. Pengertian Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.....	40
2.6.2. Pengukuran Kinerja.....	41
2.6.3. Indikator Kinerja .....	45
2.6.4. Manfaat Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan .....	49
2.6.5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja .....	50
2.7. Mekanisme Kerja DPRD .....	55
2.8. Prestasi Kerja DPRD.....	57
2.9. Pengembangan SDM Meningkatkan Produktivitas DPRD.....	58
<b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>62</b>
3.1. Bentuk Penelitian .....	62
3.2. Lokasi Penelitian dan Sampel .....	62
3.3. Variabel Penelitian .....	63
3.4. Ukuran Kinerja .....	64
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	64
3.6. Teknik Analisa Data.....	65
<b>BAB IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>67</b>
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tenggara.....	67
4.1.1. Administrasi Pemerintahan Kabupaten .....	67
4.1.2. Demografi .....	68
4.1.3. Geografi .....	70
4.1.4. Ekonomi.....	73
4.1.5. Sosial Budaya .....	74
4.1.6. Transportasi dan Komunikasi .....	76

4.2. Sekretariat .....	76
4.2.1. Pengembangan Sumber Daya Manusia .....	78
4.2.2. Kinerja Legislatif.....	78
4.2.3. Peranan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik.....	79
<b>BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>80</b>
5.1. Karakteristik Responden.....	80
5.2. Variabel Penelitian.....	83
<b>BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>93</b>
6.1. Kesimpulan .....	93
6.2. Saran-saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>



## INTISARI

Untuk mewujudkan suatu ketata pemerintahan yang baik yang sangat dibutuhkan adalah keterlibatan Lembaga-lembaga Pemerintah, Semi Pemerintah, Non Pemerintah dan Swasta. Aspek-aspek yang harus di sentuhpun kompleks mencakup politik, budaya dan ekonomi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagai suatu Badan Legislatif di daerah mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pencapaian tujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik di Kabupaten Aceh Tenggara. Fungsi pokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara adalah bersama-sama dengan Bupati membentuk suatu Peraturan Daerah yang tentu saja mendapat persetujuan bersama (fungsi legislasi), menetapkan anggaran daerah (fungsi anggaran) dan melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan dan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka mencapai keberhasilan tersebut, maka sangat dituntut kinerja yang optimal dari Anggota Dewan yang bersangkutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Aceh Tenggara. Sampel yang digunakan terdiri dari dua sampel, yaitu : menggunakan sampel peluang terhadap populasi DPRD di lapangan sebanyak 25 orang dan sampel yang akan diambil dari populasi Para Tokoh Agama, masyarakat serta organisasi Kepemudaan di lapangan digunakan cara sampel purposif sebanyak 79 orang. Jadi jumlah keseluruhan responden sebanyak 104 orang. Analisis data di lakukan dengan menggunakan metode analisa kualitatif deskriptif dengan menggunakan tabel tunggal atau tabel frekwensi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik masih jauh dari harapan. Artinya kurang efektifnya pelaksanaan ketiga fungsi pokok tersebut, maka untuk meningkatkan kinerja Para Anggota DPRD di lapangan tentu saja yang harus di benahi terlebih dahulu adalah Para Anggota DPRD itu sendiri disamping juga adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang menuju kearah terciptanya Demokratisasi dan Otonomi Daerah. Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara di pengaruhi oleh variabel pelaksanaan peranan DPRD, besarnya pengaruh variabel tersebut sebesar 52 persen yang menyikapi dari responden Anggota DPRD dan 53,17 persen pendapat dari Tokoh Agama, masyarakat serta Organisasi Kepemudaan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi di Kabupaten Aceh Tenggara; sebesar 56,96 persen (tidak efektif) pendapat dari Tokoh Agama, Masyarakat serta Organisasi Kepemudaan dan 0 persen pendapat Anggota DPRD terhadap pelaksanaan fungsi anggaran di Kabupaten Aceh Tenggara dan sebesar 56,96 persen (kurang efektif) pendapat dari Tokoh Agama, Masyarakat serta Organisasi Kepemudaan dan 0 persen pendapat Anggota DPRD terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan di Kabupaten Aceh Tenggara.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Regime Orde Baru pada awal berdirinya mendeklarasikan diri sebagai kritik atas regime Orde Lama. Kritik yang paling utama adalah bahwa Orde Lama telah gagal dalam membangun dukungan politik masyarakat, yang ditandai dengan terjadinya pemberontakan di berbagai wilayah. Latar belakang dari pemberontakan-pemberontakan tersebut beraneka ragam, mulai dari ketimpangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa, kekecewaan terhadap sistem pemerintahan yang sentralistis, konflik internal militer, hingga persoalan ideologi negara.

Terhadap berbagai sumber masalah tersebut, Orde Baru mampu mengelolanya dengan cukup baik, yakni melalui penetapan Pancasila sebagai ideologi negara dan diakhirinya disharmoni hubungan sipil-militer. Namun persoalan ketidakpuasan daerah tidak terselesaikan, di mana sistem pemerintahan dan keuangan daerah semakin tersentralisasi dan struktur pemerintah propinsi, kabupaten/kota dan desa terseragamkan sehingga mengikis peran para pelaku politik lokal. Karena itu Orba dapat dikatakan tidak konsisten dengan visinya sendiri, dari yang seharusnya demokratik menjadi otoritarian. Pada akhirnya dia tumbang karena sendi-sendi pemerintahan penopang kekuasaan mengalami kebusukan. Apa yang disebut sebagai kejayaan atau "kebangkitan nasional ke-2" (yang pertama adalah 1908) ternyata semu, dan bangsa Indonesia jatuh ke dalam krisis multidimensi. Kemunculan Orde Reformasi (?) menandai babak baru bangsa Indonesia memasuki abad ke-21.

Apakah format pemerintahan yang baru tersebut akan menjadikan kita bangsa modern yang demokratis, adil, terbuka, dinamis dan kosmopolit? Kita mesti sungguh-sungguh membangun Indonesia baru, agar tidak jatuh dalam lubang yang sama. Kita harus mengelola masyarakat dan segala sumber daya yang kita miliki secara baik (good governance), dimana selain bercirikan demokrasi juga desentralistik. Belajar dari sejarah kita, eksperimentasi untuk mewujudkan Indonesia baru tampaknya tidak dapat lagi diharapkan dalam format pemerintahan yang sentralistik.

Pemerintahan Habibie mengesahkan UU No.22/1999 dan 25/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang dapat dikatakan sebagai revisi atas peraturan perundangan sebelumnya yaitu UU No.5/1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. UU yang mulai diterapkan pada Januari 2001 tersebut membuka sumbatan pada saluran demokrasi di tingkat lokal. UU ini memberikan peluang kepada daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya dan menggunakannya sebagai modal untuk mengatasi permasalahan, memenuhi kebutuhan, dan menyalurkan kepentingan publik/masyarakat lokal.

Banyak pihak yang menaruh harapan besar terhadap keberhasilan otonomi daerah terutama dalam mendorong terwujudnya Good Governance. Jika otonomi daerah dilaksanakan dengan baik, peluang untuk mereformasi praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia akan terbuka lebar. Dengan dimilikinya kewenangan yang besar oleh kabupaten atau kota dalam menyelenggarakan pemerintahan serta penguatan fungsi dan peran legislatif di daerah diharapkan

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, Mursi, 1997. *Sumber Daya Manusia Yang Produktif* ; Pendekatan Al-Qur'an dan Sains Gema Insani Press.
- Bellone, C.J. 1980. *Organization Theory and The New Public, Administration*. Boston. Allyn and Bacon.
- B.N. Marbun, 1994. *DPRD : Pertumbuhan, Masalah dan Masa Depan*, Jakarta, Erlangga.
- Bambang, Y, 2003. *Otonomi Daerah : Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur PEMDA dan Anggota DPRD*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah, 2000. *Metode Penelitian Sosial (Terapan Dan Kebijakan)*, Jakarta.
- Caiden, G.E. 1982. *Public Administration*, California: Palisades Publishers.
- Dwiyanto, A, 2004. *Reorientasi Ilmu Administrasi Publik: dari Government ke-Governance*, UGM Yogyakarta.
- Dwiyanto, A, 1995. *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*, Fisipol UGM, Yogyakarta.
- Danim, Sudarwan, 2004. *Metode Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Prilaku*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Dwipayana, Ari dan Sutoro Eko, 2003. *Membangun Good Governance di Desa*, Yogyakarta: IRE Press.

- Effendi,S. 1996. *Revitalisasi Sektor Publik Menghadapi Keterbukaan Ekonomi dan Demokratisasi Politik*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM.
- Erika.R, 2006. *Materi Kuliah Analisis Organisasi Publik*.
- Flippo, Edwin, 1980. *Personal Management*, New Jersey Prentice Hall, Inc.
- Harahap. Sofyan, 1996. *Manajemen Kotemporer*, Jakarta, Raja Graindo Perkasa.
- Ibrahim. Budi, 1997. *TQM Panduan Untuk Menghadapi Persaingan Global*, Jakarta.
- J. Kaloh. 2003. *Kepala Daerah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta.
- Margono, A.S, 1993. *Laporan Penelitian dan Penelusuran Alumni Jurusan Ilmu Administrasi Negara*, Yogyakarta.
- Matunna. S, 1992. *Produktivitas Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Balai Aksara.
- Nitisemito, Alex, 1985. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Ruky, A, 2001. *Sistem Manajemen Kinerja*, Gramedia Jakarta.
- Rozali,A, 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Sondang. SP. , 1998. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Suharsimi, Arikunto, 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Sudjana, 1992. *Metode Statistika*, Bandung, Tarsito.

- Sedarmayanti, 2003. *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung, Mandar Maju.
- Samodra Wibawa, 2005. *Good Governance dan Otonomi Daerah*. Modul Diklat Good Governace. Penyelenggara : Diklat Provsu dan JICA
- Toha, Miftah, 2000. *Peran Ilmu Administrasi Publik Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*. Kuliah Pembukaan Tahun Akademik 2000/2001 Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.
- Toha, Miftah, 2005. *Birokrasi Politik Di Indonesia*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999, *Tentang Pemerintahan Daerah. Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD*.
- Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2003, *Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Weiss, T.G, 2000. "Governance, Good Governance and Global Governance : Conceptual and Actual Challenges", *Third World Quarterly*, V.21 (5). Pp.795-814.
- Warsito Utomo, 2006. *Administrasi Publik Baru Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- <http://www.goodgovernance.com>